

PENGARUH UPAH MINIMUM, TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kadek Bagus Siwa Nata Mahendra¹
Sudarsana Arka²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: gizmosiwanata@yahoo.com/ telp: 087860008869

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Bali untuk memperluas kesempatan kerja serta menciptakan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan pembangunan baik dibidang pendidikan dan sumber daya manusia untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek menuju kehidupan yang lebih baik diwaktu sekarang maupun diwaktu mendatang. Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali; 2) untuk menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali; 3) untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data dengan pencatatan langsung berupa data upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat periode tahun 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Kata kunci: *Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

The Government of Province Bali to expand employment opportunities and create community welfare is carried out by increasing development in the field of education and human resources to prosper and improve people's lives in various aspects towards a better life now and in the future. The purpose of this study is; 1) to analyze the effect of minimum wages and education levels on employment in regencies / cities in Bali Province; 2) to analyze the effect of the minimum wage, education level and labor absorption on the welfare of the community in Bali's regencies / cities; 3) to analyze labor absorption mediating the effect of minimum wages and education levels on the welfare of the community in the districts / cities of the Province of Bali. Data collection techniques with direct recording in the form of minimum wage data, education level, employment and public welfare in the 2014-2018 period. The data analysis technique used in this study is path analysis. The results showed the minimum wage and education level had a positive and significant effect on employment in regencies / cities in Bali Province in 2014-2018. Minimum wages, education levels and employment have a positive and significant effect on community welfare in districts / cities in Bali Province in 2014-2018. Absorption of labor mediates the effect of minimum wages and education levels on community welfare in districts / cities in Bali Province in 2014-2018.

Keywords: Minimum Wages, Education Level, Labor Absorption, Community Welfare

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 121,87 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,41 persen (1,7 juta jiwa) dibandingkan keadaan pada Agustus 2015. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja (Erick, 2016). Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,94 persen (7,24 juta jiwa).

Pada dasarnya pemerintah pada suatu wilayah bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pembangunan baik dibidang pendidikan dan sumber daya manusia untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek menuju kehidupan yang lebih baik diwaktu sekarang maupun diwaktu mendatang. Masih rendahnya tingkat penduduk yang bekerja tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga (Aleksandra dan Zbigniew, 2014). Tingkat kesejahteraan di Provinsi Bali sampai saat ini masih terjadi ketimpangan antara kabupaten/kota seperti tingkat

kesejahteraan pada Kabupaten Karangasem masih rendah dibandingkan Kota Denpasar, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan serta tingkat pendidikan sebagian masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan adanya kewenangan kebijakan otonomi daerah membuat setiap pendapatan daerah di Provinsi Bali di atur oleh pemerintah setempat, hal ini yang menjadikan pendapatan setiap daerah di Provinsi Bali mengalami ketimpangan serta terjadinya tingkat pendidikan yang belum merata. Hal ini yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali belum sepenuhnya merata, dalam *welfare economics*, kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan dalam arti pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga (Tina dan Andri, 2018).

Penyerapan tenaga kerja tentunya dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan (Oka dan Sudarsana, 2015). Tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai suatu bagian dalam penciptaan output, tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan suatu nilai tambah (produktivitas). Sektor ekonomi akan mengalami perubahan selama proses pembangunan berlangsung. Begitu pula persentase penduduk yang bekerja diberbagai sektor ekonomi tersebut juga akan mengalami perubahan. Hal ini tidak lepas dari pembangunan sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja (Ade dan Rizky, 2015). Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan daerah. Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu

daerah, artinya penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan (Amirul dan Wahyu, 2017). Kondisi ketenagakerjaan dapat juga menggambarkan kondisi perekonomian dan sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Ari, 2016).

Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, tidak diimbangi dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, umumnya didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi produktivitas kerja, karena pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas yang tinggi dalam suatu pekerjaan (Samuel, 2017). Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian kota, dengan adanya tenaga kerja maka roda perekonomian serta kesejahteraan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu mengatasi pertumbuhan penduduk (Rudi. dkk 2014).

Ade dan Rizky (2015) menyatakan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai penyerapan tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas (Dayuh, 2013). Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan

pemerintah itu merupakan syarat untuk tercapainya keseimbangan dengan penyerapan tenaga kerja penuh.

Berbeda halnya dari pandangan Keynes, penyerapan tenaga kerja menurut pandangan Keynes, berbeda dengan klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tidak begitu berjalan dengan lancar karena di samping tingkat kepadatan penduduk yang begitu besar juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak semuanya dapat diserap dalam dunia kerja (Izatun, 2015). Selain itu, tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah tetapi banyak yang berpendidikan tinggi namun tidak diserap dalam dunia kerja karena tidak berkualitas atau tidak mempunyai skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak merata (Devanto, 2015). Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya, karena dengan pendidikan inilah seseorang memiliki modal untuk melakukan produktivitas di dalam suatu pekerjaan yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arikunto, 2014:87).

Fenomena susahny orang berpendidikan tinggi mendapatkan kerja di negerinya sendiri (tentu dengan gaji yang "layak") itu bukan menjadi monopoli khas Indonesia. Harap diingat di Negara-negara padat penduduk seperti India, Pakistan, Iran, Mesir atau China misalnya kejadian yang sama juga mereka alami (Dian dan Marhaeni 2015). Betapa banyak lulusan perguruan tinggi dari negara yang disebutkan di atas terpaksa bekerja mengadu nasib di luar negeri karena di negaranya tidak ada lowongan yang memadai. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia disuatu bangsa (Yuni dan Sudibia, 2015).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan (Imam, 2016). Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan, oleh karenanya dibutuhkan menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif yang mengacu pada pendidikan (Desi, 2018). Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Izatun, 2015) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk

kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011:87). Dengan demikian sekurangnya pendidikan perlu diperhatikan oleh Pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara empirik ditemukan juga adanya gap riset dari penelitian yang dilakukan oleh Yustiana (2017) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus penyerapan tenaga kerja tidak selalu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Taufik dan Eny (2014) yang membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Emilia (2015) berpendapat yang sama dalam penelitiannya dimana penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini, karena pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun pasar tenaga kerja berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja turunan (*derived demand*) dimana permintaan akan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Todaro, 2011::487). Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau

peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda (Simanjuntak, 2015: 89).

Peningkatan produktifitas sumber daya manusia berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Secara empirik ditemukan juga adanya gap riset dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi. dkk (2018) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Yustiana (2017) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja memediasi hubungan positif penerimaan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat. Richard and Robert (2017) berpendapat berbeda dalam penelitiannya penyerapan tenaga kerja tidak memediasi pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Siti (2016) membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif tidak memediasi pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemaparan masalah yang telah dijabarkan, didukung dengan karya ilmiah dan teori rumusan masalah dari karya ilmiah ini yang hendak dicapai 1) Bagaimana pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, 2) Bagaimana pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, 3) Apakah penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Melalui pemaparan masalah yang telah dijabarkan, dan berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari karya ilmiah ini yang hendak dicapai 1) Untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, 3) Untuk menganalisis peran penyerapan tenaga kerja dalam memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Teori Klasik

Teori klasik, menjelaskan bahwa didalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (*price taker*). Untuk memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan (Solow, 1956 dalam Arsyad, 1997). Fungsi permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil marjinal yaitu tambahan hasil (*output*) yang diproduksi pengusaha dengan menambah seorang pekerja, (2) permintaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut.

Welfare Economics

Definisi *welfare economics* dalam Black's Law Dictionary (Wolfson, 1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, seperti tanggung jawab negara untuk mensejahterakan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

hidup, pelayanan sosial, kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan serta jaminan asuransi kepada masyarakatnya.

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Faktor-faktor Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik Indonesia (2018) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

Tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. Tingkat pendidikan keluarga. Tingkat kesehatan keluarga.

Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2011:112), penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu (Alexandra, 2014). Jika diasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), maka fungsi produksinya adalah:

$$Q_t = f(L_t, K_t) \dots \dots \dots (2.1)$$

Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan (Simanjuntak, 2015).

Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun.

Upah Minimum

Menurut Mankiw (2003) upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran (Hung and Shengquan, 2014). Ketika pasar berada dalam kondisi ekuilibrium, masing-masing perusahaan “membeli” tenaga kerja dalam jumlah yang menguntungkannya, berdasarkan harga atau upah ekuilibrium itu berarti setiap perusahaan telah merekrut pekerja dalam jumlah dimana nilai produk marginal sama dengan upah (Kiran *et al.*, 2014).

Tingkat Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat ketertinggalan dan keterbelakangan suatu daerah (Arikunto, 2014:56).

Indikator Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

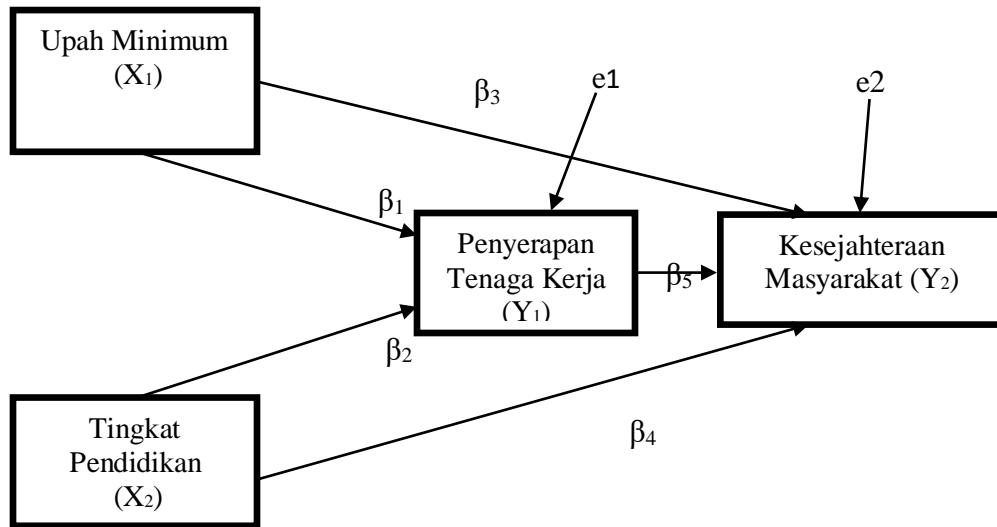
Kerangka Konseptual Penelitian

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 7 tahun 2013 juga menyatakan mengenai upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.

Kenaikkan upah berarti menaikkan kemakmuran penduduk, penelitian Nurhikmah (2017) menyatakan upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Vivi (2016) menyatakan upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Yustiana (2017) membuktikan hal yang sama dimana upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan pendidikan yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi.

Berdasarkan penelitian (Emilia, 2015) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Akmal (2010) membuktikan hal yang sama tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Gideon *et al.* (2013) menyatakan hal yang sama dengan tingkat pendidikan yang tinggi berpengaruh positif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan *welfare economics* dalam Black's Law Dictionary (Wolfson, 1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, seperti tanggung jawab negara untuk mensejahterakan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial, kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan serta jaminan asuransi kepada masyarakatnya.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian yang sebelumnya (Sugiyono, 2013:112) maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:68).

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, yang terkait dengan obyek penelitian.

Obyek penelitian adalah suatu hal atau apa saja yang menjadi perhatian dan apa saja yang diteliti (kamus bahasa Indonesia, 2008). Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah variabel upah minimum (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2), variabel mediasi adalah penyerapan tenaga kerja (Y_1) dan variabel endogen adalah kesejahteraan masyarakat (Y_2).

Data kualitatif adalah data 9 Kabupaten/Kota yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Denpasar dan data lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder yang

dipergunakan seperti observasi mengenai data upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Denpasar.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Teknik analisis ini digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Adapun langkah-langkah dalam analisis jalur (*path analysis*) adalah sebagai berikut:

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep teoritis yaitu: upah minimum dan pendidikan berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Tenaga kerja, upah minimum berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja; Langkah kedua menentukan persamaan model structural; Langkah ketiga yaitu perhitungan koefisien jalur menggunakan *software SPSS versi 24.0* melalui analisis regresi yang distandardisasi (*standardized coefficients beta*) untuk pengaruh langsungnya, sedangkan pengaruh tidak langsungnya merupakan perkalian antara koefisien jalur yang dilalui setiap persamaan dan pengaruh total adalah

penjumlahan dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung; Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan intepretasi hasil analisis.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (X_1) terhadap variabel terikat (Y_2) melalui variabel intervening (Y_1).

Tabel 1
Hubungan Variabel Langsung dan Tidak Langsung serta Pengaruh Total

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
$X_1 \longrightarrow Y_1$	β_1	-	β_1
$X_1 \longrightarrow Y_2$	β_2	-	β_2
$X_2 \longrightarrow Y_1$	β_3	$\beta_1 \times \beta_5$	$B_3 + (\beta_1 \times \beta_5)$
$X_2 \longrightarrow Y_2$	β_4	$\beta_2 \times \beta_5$	$B_4 + (\beta_2 \times \beta_5)$
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	β_5	-	β_5

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Jalur

Berdasarkan persamaan substruktural 1 dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel bebas upah minimum (X_1) dan tingkat pendidikan (X_2) terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y_1). Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,241 X_1 + 0,595 X_2 + e_1$$

Tabel 1
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural 1

Regresi	Koef. Reg. Standar	t Hitung	P. Value	Keterangan
$X_1 \longrightarrow Y_1$	0,241	2,102	0,042	Signifikan
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0,595	5,193	0,000	Signifikan

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan persamaan substruktural 1, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 18,996 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya bahwa model regresi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sudah layak (*fit*).

Berdasarkan persamaan substruktural 2 dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel bebas upah minimum (X_1), tingkat pendidikan (X_2) dan penyerapan tenaga kerja (Y_1) terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat (Y_2). Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,129 X_1 + 0,840 X_2 + 0,153 Y_1 + e_1$$

Tabel 2
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural 2

Regresi	Koef. Reg. Standar	t. Hitung	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,129	4,767	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,840	25,546	0,000	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,153	4,443	0,000	Signifikan

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan persamaan substruktural 2, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 518,356 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya bahwa model regresi pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat sudah layak (*fit*).

Tabel 3
Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan
Pengaruh Total Antar Variabel

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y ₁	
X ₁ → Y ₁	0,241	-	0,241
X ₂ → Y ₁	0,595	-	0,595
X ₁ → Y ₂	0,129	0,036	0,165
X ₂ → Y ₂	0,840	0,091	0,931
Y ₁ → Y ₂	0,153	-	0,153

Sumber: data diolah, 2020

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar (*Standard Error of Estimate*)

Untuk mengetahui nilai e₁ yang menunjukkan jumlah varian variabel penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum dan tingkat pendidikan dengan menggunakan rumus.

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - R_1^2)} = \sqrt{1 - 0,475}$$

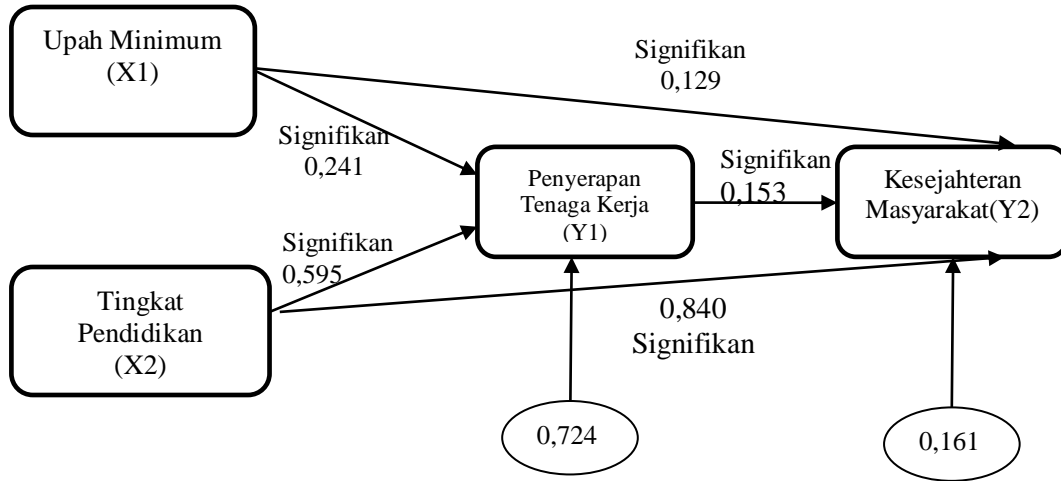
$$e_1 = 0,724$$

Sedangkan untuk mengetahui e₂ yang menunjukkan jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan rumus

$$e_2 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - R_1^2)} = \sqrt{1 - 0,974}$$

$$e_2 = 0,161$$



Gambar 3
Diagram Analisis Jalur Penelitian

Nilai Koefisien Determinasi Total

Agar dapat mengetahui validitas model, ada indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total dengan hasil sebagai berikut.

$$R^2m = 1 - (e_1^2) (e_2^2)$$

$$R^2m = 1 - (0,475^2) (0,974^2)$$

$$R^2m = 1 - (0,225) (0,948)$$

$$R^2m = 1 - 0,213 = 0,787$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,787 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 78,7 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 21,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengujian Pengaruh Langsung

Pengaruh Langsung Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient* beta sebesar 0,241 dengan nilai signifikansi 0,042 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient* beta variabel tingkat pendidikan sebesar 0,595 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient* beta variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0,153 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient* beta variabel upah minimum sebesar 0,129 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient* beta variabel tingkat pendidikan sebesar 0,840 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Mediasi pengaruh Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Untuk Mengetahui penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi atau tidak dari pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali digunakan pengujian pengaruh tidak langsung. Berdasarkan hasil perhitungan di dapatkan nilai z hitung sebesar $3,261 > z$ tabel sebesar 1,96, maka H_0 ditolak. Artinya penyerapan tenaga kerja merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Mediasi pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Untuk Mengetahui penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi atau tidak dari pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali di dapatkan nilai z hitung sebesar $4,333 > z$ tabel sebesar 1,96, maka H_0 ditolak.

Artinya penyerapan tenaga kerja merupakan variabel mediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan upah minimum dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja, ini berarti upah minimum merupakan salah satu faktor penentu penyerapan tenaga kerja yang berarti menaikkan kemakmuran penduduk, sejalan dengan pendidikan yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Berdasarkan teori klasik (Arsyad, 1997) pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Hubungan tingkat pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif yang menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan atau pendidikan yang ditamatkan maka akan semakin tinggi pula tingkat pekerjaan yang dimiliki tenaga kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan – pekerjaan yang ada pada umumnya. Tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan dan memiliki skill tentu akan banyak tenaga kerja yang serap dalam perusahaan karena perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill untuk memperlancar kegiatan produksi.

Hasil menunjukkan upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, berdasarkan *welfare economics* dalam Black's Law Dictionary (Wolfson, 1997:218) menyebutkan kesejahteraan masyarakat dinilai dari pemerintahan pada suatu bangsa yang menjalankan berbagai program sosial, kesejahteraan bagi warga

negara menjadi kewajiban negara baik dari segi penghasilan, pendidikan, pendapatan serta jaminan asuransi kepada masyarakatnya.

Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini diartikan kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada perusahaan serta pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Dalam *welfare economics*, dengan pendapatan yang diperoleh maka rumah tangga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyekolahkan anggotanya. Melalui jalur pendidikan maka sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan peningkatan upah (Ela. dkk 2018)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ahal-hal yang dapat disimpulkan yaitu upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Berdasarkan simpulan, saran-saran yang dapat diberikan Pemerintah pusat maupun daerah di Provinsi Bali harus memperhatikan pemerataan dalam aspek pendapatan dengan berfokus kepada penetapan nilai upah dengan tepat untuk

meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah seyogyanya memiliki sinergi antara pemerintahan kabupaten/kota dan Provinsi serta pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang menyertainya. Agar kebijakan pengeluaran pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga dipertegas bahwa dalam pertumbuhan akan diciptakan peningkatan perluasan kesempatan kerja, mengingat masih kecilnya elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pemerintah sebaiknya meningkatkan produktifitas tenaga kerja di berbagai sektor dengan memberikan latihan keterampilan bagi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga output meningkat dengan cara meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Achmad Solihin Ni Made Sukartini. 2014. Hubungan Upah dan Penawaran Tenaga Kerja Supir Taxi di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(1): h: 60-72
- Ade Jamal mirdad, Rizky Trinanda Akhbar. 2015. Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. 3(1): h: 249-262
- Alexandra Hukom. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2): h: 120-129

- Amirul Muminin., M, Wahyu Hidayat R., 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1(3): h: 374 – 384
- Ari Zuliadi. 2016. Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Riset Teknologi dan Pendidikan*. 4(1): h: 1-35
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Alan Manning. 2016. The Elusive Employment Effect of the Minimum Wage. *International Journal of Centre Economic Performance*. 2(4): h: 14-28
- Aleksandra Majchrowska, Zbigniew Zólkiewski. 2014. The Impact of Minimum Wage on Employment in Poland. *International Journal of Investigaciones Regionales*. 2(4): h: 211-239
- Dayuh Rimbawan, Nyoman., 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001-2011). *Jurnal Piramida*. 8(2): h: 76-84
- Dian Purnama Yanthi, Cokorda Istri., Marhaeni., A.A.I.N. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. 11(2): h: 68-75
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Desi Marlina Nurhayati. 2018. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2016. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Devanto Pratomo. 2015. The Effects of Changes in Minimum Wage on Employment in Indonesia: Regional Panel Data Analysis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 6(2): h: 1450-2887

- Dwi Krisnarini, Musa Hubeis, Ma'mun Sarma. 2018. Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang. *Jurnal MPI*. 3(2): h:1-10
- Ela Nur Aini, Ifa Isnaini, Sri Sukamti, 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*. 3(1): h: 1-16
- Eli H. Tartiyus, Mohammed Inuwa Dauda, Amade Peter. 2015. Impact of Population Growth on Economic Growth in Nigeria (1980-2010). *Journal of Humanities And Social Science*. 20(4): h: 115-123
- Emilia Herman. 2015. The Impact of Economic Growth Process on Employment in European Union Countries. *The Romanian Economic Journal*. 1(4): h: 47-67
- Erick Permana Saputra. 2016. Pengaruh Pertambahan Penduduk dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(3): h: 961-970
- Gideon Kiguru Thuku, Gachanja Paul and Obere Almadi. 2013. The Impact of Population Change on Economic Growth In Kenya. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 2(6): h: 43-60
- Harsono. 2011. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hung Wong, Shengquan Ye. 2014. Impact of enforcing a statutory minimum wage on work and quality of life of vulnerable groups in Hong Kong. *International Journal of Social Welfare*. 3(7): h: 1-13
- Imam Buchari. 2016. Pengaruh Upah Minimum dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *Jurnal Stiedewantara*. 11(1): h: 1907-7513
- Izatun Purnami. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(4): h: 1-16
- Keiko Tamada. 2015. Analysis of the Determinants of Minimum Wages in Japan. *International Journal of Japan Labor Review*. 8(2): h: 24-41

- Kiran.R, Subashini K, K.Nagamani. 2014. Impact of Economic Growth on Employment in India. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 3(4): h: 2319-8753
- Mantra, Ida bagus. 2009. *Autobiografi Seorang Budayawan*. Penyunting I.B. Wiana. Denpasar: Upada Sastra
- Mosher. 2007. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasguna.
- Mudrajad Kuncoro, 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Edisi Empat). Jakarta: Erlangga
- Nurhikmah Risvi Said. 2017. Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1(2): h: 34 – 48
- Oka Artana Yasa, I Komang., Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1): h: 63-71
- Patricia Jones. 2017. The Impact of Minimum Wage Legislation in Developing Countries where Coverage is Incomplete. *International Journal of African Economies*. 2(9): h: 1-29
- Richard P. Cincotta and Robert Engelman. 2017. Economics and Rapid Change: The Influence of Population Growth. *International Journal of Population Action International*. 3(5): h: 1-30
- Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, Deny Setiawan. 2014. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Fekom*. 1(2): h: 1-16
- Saltiel, F. Urzúa, S. 2017. The Efect of The Minimum Wage on Employment in Brazil. *International Journal of Economic*. 2(4): h: 2-12
- Samuel Randy Tapparan. 2017. Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi*. 4(1): h: 1-8

- Sharon H. Mastracci and Joseph J. Persky. 2018. Effects of state minimum wage increases on employment, hours, and earnings of low-wage workers in Illinois. *The Journal of Regional Analysis and Policy*. 268-278
- Simanjuntak, Payaman J. 2015. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FE-UI
- Siti Nur Aishah Mohd Hashim. 2016. Minimum Wage Policy Effects on Economic Growth. *International Journal of Economics and Management Sciences*. 4(9): h: 1-21
- Solow, Robert. 1956. *A Contribution to The Theory of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics (The MIT Press)
- Suartha, Nyoman., Murjana Yasa., I Gst Wayan., 2017. Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(1): h: 95-107
- Sudarsono, S. 1995. *Pengantar Ekonomi Mikro*. (Edisi lima). Jakarta: LP3S
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syahril. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. 1(2): h: 2442-7411
- Syahrina Syam, Abdul Wahab. 2015. Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1(1): h: 35 – 54
- Taufik Muhammad, Eny Rochaida Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2): h: 90-101
- Tina Rahim, Andri Kurniawan. 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Remaja di Kecamatan Cisayong. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 4(2): h: 1 – 8
- Todaro, Michael, 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga

- Vivi Alatas, Lisa Cameron. 2016. The Impact of Minimum Wages on Employment in a Low Income Country: An Evaluation using the Difference-in-Differences Approach. *International Journal of Economics University of Melbourne*. 4(3): h: 1-43
- Wolfson, Adam, 1997, Welfare Fixers, dalam *Social Responsibility In The United States*, U.S.Society & Values, Electric Journals Of The US Information Agency, Number 20.
- Ximena Del Carpio, Cuong Nguyen, Ha Nguyen, Choon Wang. 2013. The Impact of Minimum Wages on Employment, Wages and Welfare: The Case of Vietnam. *International Journal of Munich Personal Repec Archive*. 1(8): h: 1-32
- Yuni Adipuryanti, Ni Luh Putu., Sudibia, I Ketut., 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. 11(1): h: 20-28
- Yustiana Dwirainaningsih. 2017. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(4): h: 1 – 14